

KARAKTERISTIK DAN STRUKTUR KESEMPATAN KERJA DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

H. Syaukani. HR

Fakultas Ekonomi Kutai Kartanegara Kalimantan Timur

Abstract

This shift in employment has result from changes occurring in the economic structure. High growt in the industrial sektor, particularly in manufacturing and construction, has created many job opportunities in these sektor. On the contranry, the shift in the use of land from primer to other purposes has defresed employment opportunities in the primer sektor. Furthermore, people perceive that working in the tertier sektor provides better incentive than working in the primer sektor.

Keywords: *production, employment, economic growt.*

PENDAHULUAN

Proses pembangunan yang berlangsung di negara-negara yang sedang berkembang ditunjukkan adanya gejala menurunnya peranan sektor primer terhadap perekonomian nasional. Di samping itu peranan sektor tersier yang cukup dominan dalam penyediaan kesempatan kerja diperkirakan sebagai akibat dari pergeseran kesempatan kerja yang cukup kuat dari sektor primer menuju ke sektor tersier, dengan melampaui sektor sekunder (Bremas, 1985: 47). Dengan demikian, pola umum dari ekonomi perkotaan di negara-negara yang sedang berkembang adalah besarnya peranan sektor non pertanian yang pada umumnya didominasi oleh sektor tersier.

Struktur kesempatan kerja di Kabupaten Kutai Kartanegara pada umumnya juga mengikuti pola tersebut. Adanya peranan sektor tersier yang dominan dalam menyediakan kesempatan kerja, baik untuk wilayah tengah dan pantai, proporsi penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor tersier berkisar antara 59,2% sampai 68,0%, sedangkan proporsi mereka yang

bekerja disektor primer hanya berkisar antara 44,25% (Susesnas, 2000).

Apabila angka-angka di atas ditelaah lebih lanjut, nampak bahwa ada perbedaan antara struktur kesempatan kerja di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dominasi sektor tersier yang cukup signifikan. Dalam hal ini proporsi kesempatan kerja di sektor tersier hampir sama dengan yang terjadi di Kabupaten/Kota dalam wilayah Kaltim. relatif tingginya proporsi pekerja di sektor formal di Kabupaten Kutai Kartanegara di banding wilayah Kabupaten di Kaltim setidaknya menyiratkan adanya perbedaan sifat pekerjaan di sektor tersier antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten lain di Kaltim. Pembahasan mengenai perbedaan struktur karakteristik pekerjaan di sektor tersier ini akan diuraikan lebih jauh pada bagian berikut.

KONDISI DAN PERMASALAHAN

Berdasarkan strategi pembangunan pewayalahan, maka wilayah pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi atas tiga kesatuan wilayah yang disebut Wilayah Pembangunan Terpadu (WPT) atau *inte-*

grated Area Development. WPT I atau wilayah pantai, meliputi; Kecamatan Samboja, Muara Jawa, Muara Badak, Anggana, Marang Kayu dan Sang-Sanga. WPT II atau wilayah tengah, meliputi; Kecamatan Tenggarong, Loa Kulu, Loa Janan, Tenggarong Seberang, Sebulu dan Muara Kaman. WPT III atau Wilayah hulu, meliputi Kecamatan Kota Bangun, Muara Wiss, Muara Muntai, Kembang Janggut, Kenohan dan Tabang. WPT terdiri dari kombinasi beberapa Kecamatan yang mempunyai ciri-ciri yang saling melengkapi satu sama lain dan disetiap WPT terdapat satu Pusat Pelayanan Wilayah (PPW).

Kegiatan ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara terkonsentrasi di WPT I (wilayah pantai) dan WPT II (wilayah tengah). Sedangkan wilayah hulu (WPT III) perkembangannya relatif tertinggal. Laju pertumbuhan ekonomi di wilayah ini lebih lambat dari wilayah lainnya. Sehingga masih mengakibatkan terjadinya kesenjangan antar wilayah pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kesenjangan ini menimbulkan permasalahan dalam akselerasi pembangunan. Oleh karena itu, persoalannya adalah bagaimana meningkatkan pengembangan wilayah yang tertinggal tersebut dengan menyerasikan laju pertum-

buhan agar kesenjangan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran antara wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara semakin berkurang.

Sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan yang berarti dalam memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi peningkatan PDRB adalah sektor pertambangan dan penggalian 79.21%, sementara untuk sektor pertanian baru dapat menyumbang 10.12%, perdagangan, restoran dan hotel 3.35%, konstruksi 3.13% dan Keuangan 1.82% dalam PDRB. Kemudian, salah satu permasalahan yang patut disikapi secara cermat dalam pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah masih rendahnya kontribusi sektor industri dan pengolahan 0.62%, sektor jasa 0.93%, sektor pengangkutan dan komunikasi 0.76% dan kontribusi yang paling rendah dalam pembentukan PDRB adalah sektor listrik, gas dan air hanya mencapai 0.06%.

Sektor pertambangan dan penggalian, saat ini merupakan sector yang paling dominan dalam pembentukan total PDRB. Sebagian besar disumbang oleh peningkatan sub sector pertambangan, khususnya Migas dan Batu Bara.

**Tabel 1. Distribusi PDRB menurut Lapangan Usaha
(Harga Konstan tahun 1999 – 2001 dalam %)**

LAPANGAN USAHA	1999	2000	2001
Pertanian	10.96	11.21	10.12
Pertambangan & Penggalian	78.22	78.52	79.21
Industri Pengolahan	0.72	0.45	0.62
Listrik, Gas & Air Bersih	1.05	0.05	0.06
Bangunan	2.96	2.87	3.13
Perdagangan, Hotel & Restoran	3.35	3.27	3.35
Pengangkutan & Komunikasi	0.82	0.77	0.76
Keuangan, persewaan & Jasa Perusahaan	0.95	1.91	1.82
Jasa-jasa	0.96	0.95	0.93
Total	100.00	100.00	100.00

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2002

Sementara itu, sektor pertambangan dan penggalian yang ditekuni 5.29% penduduk mampu menyumbang 79.21% PDRB, hal ini dikarenakan sektor tersebut pada dasarnya hasil eksploitasi sumber daya alam. Lebih lanjut sektor pertanian yang ditekuni 44.24% penduduk, produktivitasnya dalam pembentukan PDRB hanya mencapai 10.12% (BPS, 2002).

Ditinjau dari perkembangan tenaga kerja terjadi perubahan struktur yang berasosiasi dengan perubahan struktur ekonomi. Kenaikan pangsa penyerapan tenaga kerja terjadi sektor perdagangan dan jasa (*tertier*) dari 10.73% tahun 1997 menjadi 31.40% tahun 2002, kemudian sektor *manufacture* (sekunder) pada tahun 1997 baru mencapai 10.73%, maka pada tahun 2003 mencapai 31.40%. Penurunan pangsa penyerapan tenaga kerja terjadi pada sektor *agriculture* (primer) pada tahun 1997 (60.40%) menurun cukup tajam menjadi 44.25 % pada tahun 2002 (Monografi, 2002). Hal ini memberikan gambaran bahwa struktur ketenagakerjaan mulai bergeser dari sektor primer ke sektor sekunder dan tertier. Namun demikian, struktur ketenagakerjaan disektor primer masih memegang prosentase terbesar.

Seiring dengan perubahan struktur ketenagakerjaan, jumlah pengangguran secara prosentase terlihat bahwa tingkat pengangguran pada tahun 2002 mencapai 8.17% dan tingkat setengah pengangguran 21.83% dari 363.986 (56.93%) angkatan kerja dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja 4.12% pertahun (BPS Kutai Kartanegara, 2002).

PENCIPTAAN KESEMPATAN KERJA

Keadaan angkatan kerja suatu masyarakat secara umum dapat menggambarkan kehidupan sosial masyarakat tersebut. Dari data angkatan kerja dan kesempatan kerja seperti yang di deskripsikan di atas, yakni seberapa besar partisipasi dalam angkatan kerja dan tingkat kesempatan kerja

yang ideal, sehingga peningkatan jumlah angkatan kerja selaras dengan peningkatan kesempatan kerja, implikasinya adalah tingkat pengangguran dapat ditekan sekecil mungkin.

Sejalan dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, jumlah angkatan kerjapun senantiasa meningkat dari tahun ke tahun, oleh karena itu pemerintah harus membangun kembali kesempatan kerja dengan mempersiapkan seluruh masyarakatnya dengan memberi perhatian, keterampilan dan kapasitas untuk memberi kontribusi kepada pekerjaan dan pelayanan masyarakat. Sedikitnya pekerjaan yang tersedia bagi sarjana dari pada yang dibutuhkan menyebabkan para sarjana saat ini bersaing dengan lulusan SLTA untuk pekerjaan-pekerjaan dengan keterampilan rendah. Angkatan kerja meningkat di setiap sektor, termasuk sektor primer (pertanian dalam arti luas). Peningkatan tenaga kerja sektor tersier dan peningkatan produktivitas dengan beberapa standar memberikan rangsangan bagi perekonomian (Anwar, 1992: 32).

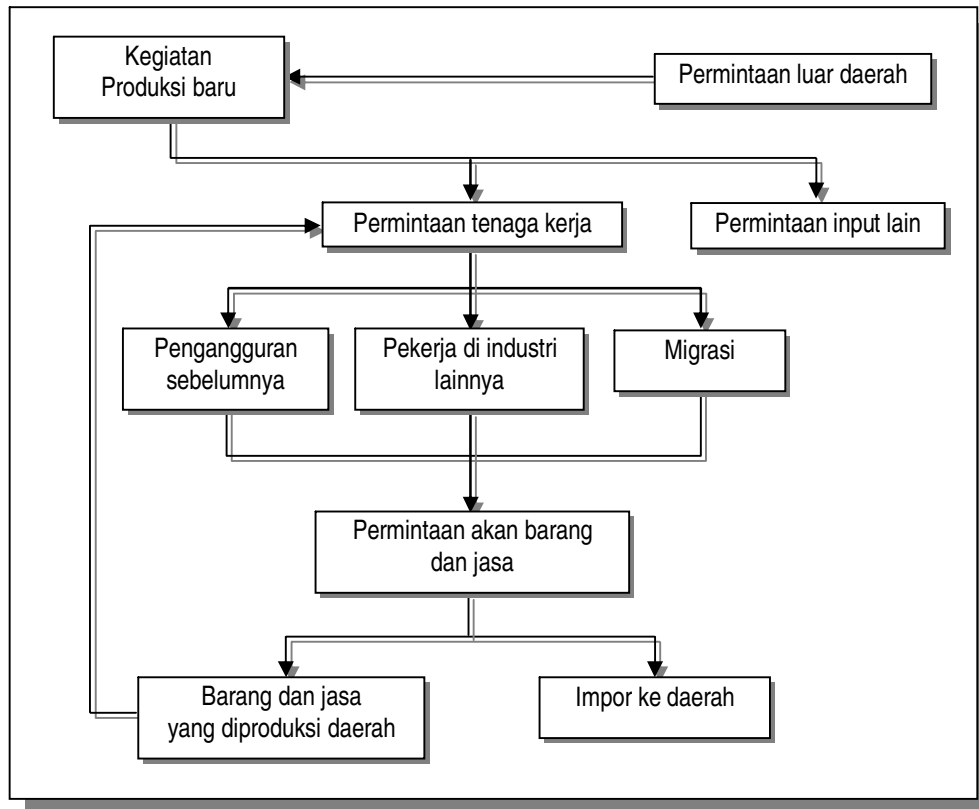
Menurut Latif (1994: 21) pembangunan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja dapat didesain di beberapa lokasi untuk memecahkan masalah ekonomi. Dengan mencoba mengerti fenomena dan konsekwensinya kepada daerah merupakan langkah pertama yang dapat diambil. Para pimpinan daerah dapat mengidentifikasi situasi yang dihadapi oleh daerah dalam konteks yang lebih luas. Dengan kata lain, penilaian terhadap akibat yang ditimbulkan kelompok dapat dibuat untuk mengukur betapa kelompok yang bervariasi dapat merespon tindakan-tindakan dengan cara yang berbeda. Pada konteks ini, solusi daerah dapat ditemukan untuk pemecahan masalah daerah. Oleh karenanya, kebijakan nasional yang efektif akan membantu dalam formasi dasar penciptaan keseimbangan antara kepentingan pemerintah

pusat dan daerah terutama dalam kaitannya dengan penciptaan kesempatan kerja.

Pentingnya suatu daerah untuk meningkatkan angkatan kerja dengan membentuk suatu penciptaan kesempatan kerja dan pelatihan. Kebijakan yang cenderung sering terjadi hanya melatih manusianya, tetapi pekerjaan untuk menampung orang tersebut tidak ada. Perlu ada kecocokan antara angkatan kerja yang dilatih dan jumlah kesempatan kerja yang ada. Kebijakan ini lebih menekankan pada pembangunan keterampilan (*skills*). Di daerah dan membangun kembali masyarakat (Tjiptoherijanto, 2000: 33).

Salah satu cara yang terbaik untuk mengetahui kemampuan setiap sektor ekonomi dalam menciptakan kesempatan kerja adalah dengan cara menentukan proporsi lapangan kerja yang dihasilkan untuk penduduk suatu daerah per sektor. Analisis ini sering disebut dengan rasio penduduk-kesempatan kerja. Formulasi untuk menghitung rasio penduduk – kesempatan kerja adalah ($\text{rasio} = \frac{\text{jumlah penduduk suatu daerah}}{\text{jumlah pekerja secara sektoral}}$). Lebih lanjut untuk menunjukkan potret perekonomian suatu daerah terhadap kesempatan kerja dapat digambarkan dalam suatu model sebagai berikut:

Gambar I. Kegiatan produksi baru terhadap kesempatan kerja.



ANALISIS STRUKTUR KESEMPATAN KERJA SEKTOR SEKUNDER DAN TERSIER

Sektor Sekunder

Sektor sekunder terdiri atas kegiatan-kegiatan dibidang pertambangan, pengolahan, listrik gas, air minum dan konstruksi. Namun demikian, mengingat dominasi sektor pertambangan pada sektor sekunder yang cukup besar, maka analisis untuk sektor sekunder hanya membahas struktur kesempatan kerja dan karakteristik kegiatan pertambangan saja.

Data seperti nampak pada Tabel 1 prosentasi penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang bekerja di bidang pertambangan relatif lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan perbedaan struktur ekonomi antara wilayah hulu (WPT I), tengah (WPT II) dan pantai (WPT III) di Kabupaten Kutai Kartanegara, di mana kegiatan sektor pertambangan cenderung lebih terkonsentrasi di kawasan WPT I dan WP II. Tingginya proporsi pekerja di sektor pertambangan ini tentu ada kaitannya dengan jenis industri di wilayah tersebut. Mengingat bahwa WPT I dan WPT II sangat didominasi oleh industri yang padat modal (*capital intensive*), seperti pertambangan Migas dan Batu Bara, maka tingginya pro-

porosi pekerja sektor pertambangan ini tentunya erat kaitannya dengan karakteristik industri yang didominasi di wilayah tersebut.

Lebih lanjut, kegiatan sektor sekunder (industri pengolahan) lebih didominasi oleh kegiatan-kegiatan industri yang relatif besar dengan pekerja-pekerja bergaji tetap yang termasuk dalam kategori pekerja sektor formal. Oleh karena itu, tidak heran bila proporsi pekerja sektor formal baik di WPT I dan WPT II relatif tinggi dibanding dengan WPT III (85.7 dibanding 60.6).

Selain itu, relatif tingginya proporsi pekerja sektor formal di WPT II dan III dibanding dengan WPT I menyiratkan relatif modernnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang berkembang di ke dua wilayah tersebut. Beberapa hal memang sudah mensinyalir adanya kecenderungan sektor formal di perkotaan semakin besar. Diantaranya Kundu (1984: 112) mengemukakan beberapa alasan mengenai meningkatnya peranan sektor formal di perkotaan. Pertama, adanya perubahan pada sistem service di perkotaan ke arah modernisasi; kedua, kecenderungan investasi pemerintah yang menguntungkan wilayah perkotaan dan ketiga, lebih tingginya tingkat perkembangan pembangunan dan modernisasi di kota-kota.

Tabel 2. Proporsi pekerja sektor pertambangan dan pekerja sektor formal di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2002 (%)

Pekerja	WPT I	WPT II	WPT III
Industri pertambangan *)	20.9	15.3	5.8
Sektor formal *)	80.7	85.7	60.6

Sumber: BPS Kab. Kutai Kartanegara, 2002 (diolah)

*) Proporsi pekerja industri pertambangan terhadap total pekerja

*) Proporsi pekerja sektor formal di sektor sekunder terhadap seluruh pekerja di sektor sekunder.

Sektor Tersier

Sebagaimana umumnya negara sedang berkembang, kesempatan kerja perkotaan lebih banyak didominasi oleh sektor tersier yang terdiri atas usaha-usaha bidang jasa, perdagangan, transportasi dan keuangan. Tingginya kesempatan kerja di sektor ini lebih disebabkan oleh tingginya penawaran tenaga kerja di perkotaan yang tidak diimbangi oleh perluasan kesempatan kerja di sektor industri. Tekanan angkatan kerja yang tinggi diperkotaan akhirnya mendorong tumbuhnya kegiatan-kegiatan yang bersifat informal. Hasil studi Pusat Pengembangan Wilayah Unmul (2001) di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata pedagang kaki lima lebih tinggi di daerah perkotaan dari pada di daerah pedesaan, kemudian pendapatan riil pedangan kaki lima lebih besar dari pada pekerja konstruksi.

Meskipun pendapatan pedagang kaki lima tampaknya lebih tinggi dari yang diperkirakan, namun ini tidak menggugurkan hipotesis bahwa kegiatan tersebut merupakan penampungan kelebihan tenaga kerja. Gejala kelebihan tenaga kerja dalam kasus ini bukanlah jumlah jam kerja yang rendah diperusahaan, tetapi sejumlah besar pekerja dalam kaitanya dengan jumlah daya beli konsumen dan ketersediaan stok barang oleh pedagang.

Dalam pada itu, proporsi penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Kartanegara yang bekerja disektor tersier berdasarkan perwilayah, proporsi terbesar 78% di WPT I, sedikit lebih tinggi di banding yang terjadi di WPT II (77.6%), cukup tinggi dibanding yang terjadi WPT I yang mencapai 69.2%. Relatif lebih rendahnya proporsi penduduk di WPT I yang bekerja di sektor tersier ada hubungannya dengan besarnya kesempatan kerja yang tercipta di sektor sekunder khususnya yang terserap oleh kegiatan industri pengolahan kayu di wilayah tersebut.

Perbandingan antara komposisi pekerja di sektor tersier antara WPT I, WPT II dan WPT III di Kabupaten Kutai Kartanegara relatif tidak banyak berbeda. Kegiatan-kegiatan utama disektor ini secara berurutan sama-sama diciptakan oleh kegiatan-kegiatan bidang jasa (baik perorangan maupun masyarakat), bidang perdagangan, restoran, angkutan dan komunikasi.

Namun demikian, kesempatan kerja sektor tersier yang lebih modern seperti keuangan dan relatif lebih banyak di WPT II dan WPT III. Proporsi pekerja yang terserap oleh kegiatan-kegiatan ini di Kabupaten Kutai Kartanegara Kartanegara mencapai 4.0% WPT II dan di WPT I hanya mencapai 1.2%. Gambaran lebih lanjut dari proporsi pekerja di sektor tersier dapat dilihat dalam Tabel 3.

Tabel 3. Komposisi pekerja sektor tersier di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2002 (%)

Komposisi pekerja	WPT I	WPT II	WPT III
Jasa publik, perorangan, masyarakat	39.1	41.4	35.4
Perdagangan, restoran, hotel	23.8	27.8	23.4

Sumber: BPS Kab. Kutai Kartanegara, 2002 (diolah)

Tabel 4. Komposisi pekerja di kegiatan utama sektor tersier Kabupaten Kutai Kartanegara, 2002 (%)

	WPT I	WPT II	WPT III
Jasa perorangan, masyarakat:			
Adm. Publik	26.6	61.5	26.6
Kebersihan dan yg sejenis	0.3	0.4	0.1
Sosial dan kemasyarakatan	14.6	17.8	11.6
Rekreasi	0.7	1.4	0.1
Perorangan dan Rumah Tangga	53.8	59.0	31.0
Perdagangan, grosir & eceran, res taurant dan hotel:			
Pedagang grosir	2.9	4.8	1.9
Pedagang eceran	40.5	60.3	20.5
Restaurant, warung	3.2	4.7	2.1
Hotel dan Penginapan	0.6	1.7	0.1

Sumber: BPS Kab. Kutai Kartanegara, 2002 (diolah)

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3, bidang usaha jasa dan perdagangan merupakan penyedia lapangan kerja yang cukup signifikan di sektor tersier. Untuk mengungkap lebih jauh karakteristik kesempatan kerja di bidang tersebut di sini diuraikan komposisi jenis usaha yang berada dalam kategori bidang usaha perdagangan.

Sebagaimana nampak pada Tabel 4 di atas, kesempatan kerja di bidang jasa di Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi oleh kegiatan jasa perorangan dan rumah tangga. Prosentase pekerja di Kabupaten Kutai Kartanegara yang terserap oleh kegiatan ini di WPT II mencapai 59% dari seluruh pekerja di bidang jasa. Proporsi ini lebih tinggi bila dibanding proporsi pekerja di bidang jasa, perorangan dan rumah tangga di WPT I dan WPT III (proporsi pekerja di bidang jasa, perorangan dan rumah tangga WPT III sebesar 31%, sedang di WPT I sebesar 53.8%. Tingginya proporsi pekerja di bidang jasa di Kabupaten Kutai Kartanegara ini sehubungan dengan semakin meningkatnya jumlah kaum wanita terjun ke dalam lapangan kerja yang dahulu menjadi kawa-

san kaum pria. Selain itu, angka tersebut juga menyiratkan tingginya jumlah kaum wanita sebagai pencari kerja.

Selain itu kegiatan berupa jasa perorangan dan rumah tangga, kegiatan jasa lain yang cukup potensial dalam menyediakan kesempatan kerja bagi penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang cukup signifikan adalah kegiatan di bidang jasa administrasi publik. Besarnya perananan sektor Pegawai Negeri sipil ini sebagai penyedia lapangan kerja di Kabupaten Kutai Kartanegara Karta negara erat kaitannya dengan posisinya sebagai pusat pemerintahan ibu kota Kabupaten, dimana administrasi pemerintahannya mempunyai ukuran yang cukup besar. Di samping itu besarnya perananan sektor pemerintahan erat dengan misi yang diemban pemerintah, yaitu selalu berusaha memperluas kesempatan kerja di bidang-bidang yang dapat dikendalikannya dimana didalamnya termasuk kegiatan-kegiatan administrasi. Selain itu dari sisi penawaran, tingginya proporsi penduduk bekerja disektor pemerintahan ini menyiratkan besarnya minat para pencari kerja untuk memperoleh

pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil dengan gaji tetap dan jaminan pensiun.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sektor perdagangan, kesempatan kerja di sektor ini didominasi oleh kegiatan pedagang eceran. Proporsi penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara di sektor perdagangan untuk WPT II mencapai 60.3% dari seluruh pekerja di sektor perdagangan, 40.5% untuk WPT III 40.5% dan WPT I sebesar 20.5%, begitu juga halnya dengan pedagang grosir.

Perbedaan angka-angka tersebut menyiratkan perbedaan yang berarti antara kesempatan kerja di sektor perdagangan di WPT II dengan WPT I dan WPT III. Di WPT II walaupun jumlah usaha perdagangan

eceran cukup banyak jumlahnya, namun usaha perdagangan ini juga diwarnai oleh kegiatan-kegiatan sektor formal yang modern. Hal ini membawa suatu implikasi berkaitan dengan peluang kerja di sektor perdagangan di mana kesempatan kerja di sektor ini sedikit-tidaknya memerlukan pekerja-pekerja yang lebih terampil atau lebih berpendidikan.

Kesempatan kerja di bidang perhotelan dan restaurant, rumah makan di Kabupaten Kutai Kartanegara relatif masih rendah. Proporsi pekerja di sektor ini rata-rata baru mencapai 2.2%. Gambaran ini menyiratkan kecilnya proporsi pekerja di sektor ini terhadap kegiatan ekonomi dikarenakan investasi di bidang perhotelan para investor belum banyak berminat untuk menanamkan modal di sektor ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Arsyad, 1992. Transformasi Struktur Ketenagakerjaan menurut sektor penduduk pertumbuhan ekonomi Indonesia, "Makalah disampaikan pada Seminar; Ciri Demografis Kualitas Penduduk dan Pembangunan Ekonomi, Kerjasama Lembaga Demografi FE-UI dan ISEI, Jakarta.
- Bappeda Kutai Kartanegara, 2002. Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD) tahun 2001 – 2005, Tenggarong, 42 - 46
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Kartanegara, 2002. Analisis Sosial Ekonomi Kutai Kartanegara, Tenggarong, 20 - 22
- BPS bekerjasama Bappeda Kutai Kartanegara, 2002. Kutai Kartanegara Dalam Angka, Tenggarong, 100 - 112
- Bappeda Kutai Kartanegara, 2002. Monografi Kabupaten Kutai Kartanegara, Tenggarong, 99 - 101
- Breman, Jan, 1985. Sistem Tenaga Kerja Dualistis, Suatu Kritik Terhadap Sektor Informal, dalam Chris Manting dan Tajuddin Noer Effendi (ed), Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal, Gramedia, Jakarta
- Kundu, Amithabh dan P.N. Mathur. 1984. *Informal Sektor in Cities of Different Sizes, An Explanation Within the core theoretic framework, Regional Development Dialogue*
- Latif, Abdul, 1994. Kebijakan Pembangunan Ketenagakerjaan dan Permasalahannya, *Makalah disampaikan pada Sekolah Staf dan Komando TNI-AD Angk. IV*, 11 Januari, Bandung.

Pusat Penelitian Pengembangan Wilayah (P3W) Universitas Mulawarman, 2001. Pekerja Sektor Informal di Kaltim, Samarinda, 42 – 47.

Tjiptoherijanto, Prijono, 2001. Kebijakan Upah dan Industrialisasi, LPEM-FEUI, Jakarta.